**KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT**
*(Implementation Impact Assesment of Forestry Minister Regulation
Number P.55/2006 Toward Forest Product Administration System
in Private Forests)*

Oleh / By :
Epi Syahadat & Subarudi

ABSTRACT

Forest product administration system (FPAS) in private forests is not well and properly implemented because it is not incorporated into relevant district institutions. As a result sustainable forest management and optimal collection of forest product revenue cannot be achieved. Therefore, the review on FPAS is required after issuing the forestry minister regulation (Permenhut) number P.55/2006 concerning the implementation of FPAS in private forests. The objectives of the study are: (i) to identify the procedure of FPAS in private forests before issuing Permenhut No. P.55/2006.; (ii) to review the changing matter of issues and its impact on the implementation of Permenhut No. P.55/2006; and (iii) to formulate the improvements of Permenhut No. P.55/2006. This review uses a policy analysis especially for relevant regulations on FPAS in private forests.

The review showed that FPAS procedure in private forets is relatively good before issuing Permenhut No. P.55/2006. This Permenhut has an impact on the procedure of FPAS in private forests so that this regulation should be improved and revised for better private forest management in the sense of easyness, clarify and balance in responsibility. The improvement of Permenhut No. P.55/2006 should take the following issues, into consideration : (i) How FPAS could works in private forests, (ii) general problems rised in FPAS in private forests, (iii) division of business permit of private forests, in the institutions and (iv) authority given to Province Forestry Instution to manage FPAS in private forests.

Keywords : Private forest policy, forest product administration and circulation, forestry minister regulation number 55/2006.

ABSTRAK

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul

¹⁾ Peneliti pada Puslitsosek

dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi.

Kata kunci : Kebijakan hutan rakyat, penatausahaan dan peredaran hasil hutan, permenhut nomor P.55/2006.

I. PENDAHULUAN

Potensi hutan alam sebagai penghasil kayu dan devisa bagi negara semakin hari semakin menurun sehubungan dengan adanya rencana untuk diterapkan moratorium terbatas, di sisi lain permintaan kayu dan produk kayu sebagai komponen pembuatan mebelair dan perumahan rakyat.

Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kayu di luar kawasan hutan Negara adalah melalui pengembangan hutan rakyat yang sekaligus berfungsi sebagai pendukung aspek lingkungan konservasi tanah dan perlindungan tata air.

Mengingat bahwa kayu rakyat adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik masyarakat sendiri, maka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dan initiator untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran produk hasil hutannya melalui penata usahaan hasil hutan (Syahadat, 2006).

Dalam upaya menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi suatu hal yang penting dan strategis untuk diperhatikan sehingga kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) dari hutan rakyat dapat berjalan dengan baik, untuk mencapai hal tersebut maka penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat memerlukan payung hukum atau dasar hukumnya yang jelas dan tepat.

Kejelasan payung hukum tersebut dipertanyakan sehubungan dengan perubahan peraturan mengenai PUHH dari SK Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara. Perubahan aturan tersebut berdampak cukup besar terhadap kelancaran pelaksanaan PUHH di hutan rakyat karena pada kenyataannya dalam Permenhut tersebut lebih dominan mengatur PUHH di kawasan hutan negara daripada di hutan rakyat.

Oleh karena itu kajian kebijakan PUHH yang baru (Pemenhut No. P.55/2006) sangat diperlukan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dari peraturan tersebut. Kajian ini bertujuan: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian peraturan PUHH di hutan rakyat ini lebih menitikberatkan kepada kajian beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan PUHH dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Kajian Peraturan PUHH di Hutan Rakyat.

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PUHH dapat diindikasikan oleh pencapaian 3 (tiga) aspek penting dari PUHH itu sendiri, yaitu: (1) terjaganya hak-hak Negara, (2) terpeliharanya kelestarian hutan, dan (3) terkendalnya *illegal logging*. Penerapan PUHH dapat dikatakan tidak efektif apabila masih menimbulkan permasalahan-permasalahan PUHH di lapangan.

A. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Kehutanan di daerah dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan hasil hutan. Data primer yang diperoleh meliputi pelaksanaan penatausahaan kayu rakyat, kesenjangan pelaksanaan dan uraian tugas, pengeluaran perusahaan dalam pengurusan ijin, pengesahan dan penerbitan dokumen penatausahaan hasil hutan.

Data sekunder diperoleh di kantor kehutanan, perusahaan, dan perpustakaan seperti potensi hutan rakyat (luasan dan potensi tegakan hutan rakyat) dan realisasi produksi kayu bulatnya.

B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian PUHH ini adalah metode analisis deskriptif yang menguraikan dampak dan efektivitas pelaksanaan Permenhut No P.55/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat. Penilaian dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006 dilakukan dengan mengkaji isi Permenhut No. P.55/2006 tersebut kemudian dibandingkan dengan pedoman pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat dan berbagai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Permenhut No. P.55/2006 terhadap PUHH yang berasal dari hutan rakyat dilakukan dengan mengkaji isi permenhut tersebut secara seksama untuk menjawab pertanyaan tentang apakah pasal-pasal yang ada cukup untuk mengatur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat? Apabila ada sejauhmana pasal tersebut dapat dilaksanakan?

Peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan sebagai bahan kajian PUHH ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6, tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Hutan Rakyat

Gambaran umum hutan rakyat nasional dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek penting, diantaranya: (i) potensi hutan rakyat, (ii) realisasi produksi hutan rakyat, dan (iii) perkiraan pasokan kayu bulat hutan rakyat.

1. Potensi Hutan Rakyat

Luas hutan rakyat di Indonesia adalah 1.271.505,61 ha dengan jumlah perkiraan tegakan sebanyak 42.965.519 pohon sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa Jawa Tengah mempunyai lahan hutan rakyat yang terluas, yaitu 198.790,02 Ha (15,63%) dengan perkiraan potensi tegakan sebanyak 12.557.702 pohon (29,23%).

Tabel 1. Luas Lahan dan Potensi Tegakan Kayu Hutan Rakyat di Indonesia sampai dengan April 2006.

No.	Provinsi	Luas Hutan Rakyat (Ha)	Percentage (%)	Perkiraan Jumlah Pohon	Percentage (%)
1	Jawa Barat	79.056,06	6,22	4.457.327,47	10,37
2	Jawa Tengah	198.790,02	15,63	12.557.702,11	29,23
3	Jawa Timur	93.561,23	7,36	4.978.835,87	11,59
4	DI Yogyakarta	29.039,00	2,28	1.447.826,00	3,37
5	Jakarta	00	0	00	0
6	Aceh	11.040,00	0,87	38.544,22	0,09
7	Sumatera Utara	84.827,00	6,67	1.777.683,00	4,14
8	Sumatera Barat	41.697,20	3,28	67.927,00	0,16
9	Riau	14.613,06	1,15	1.757.875,00	4,09
10	Jambi	11.047,38	0,87	8.893,38	0,02
11	Sumatera Selatan	55.443,95	4,36	1.472.345,00	3,43
12	Bengkulu	1.650,00	0,13	00	0
13	Lampung	10.308,00	0,81	00	0
14	Bali	13.397,50	1,05	362.295,20	0,84
15	Nusa Tenggara Timur	150.600,00	11,84	3.190.613,55	7,43

16	Nusa Tenggara Barat	51.834,66	4,08	1.014.595,00	2,36
17	Kalimantan Selatan	136.263,00	10,72	3.885.764,00	9,04
18	Kalimantan Timur	9.074,00	0,71	00	0
19	Kalimantan Tengah	13.359,00	1,05	00	0
20	Kalimantan Barat	4.419,00	0,35	00	0
21	Sulawesi Utara	24.539,00	1,93	112.338,66	0,26
22	Sulawesi Tengah	27.693,55	2,18	441.745,35	1,03
23	Sulawesi Selatan	149.060,00	11,72	5.393.209,00	12,55
24	Sulawesi Tenggara	20.625,00	1,62	00	0
25	Maluku	3.558,00	0,28	00	0
26	Papua	36.010,00	2,83	00	0
	Jumlah	1.271.505,61	100	42.965.519,81	100
	Rata-rata	48.904,06		1.652.519,99	

Sumber : Direktorat Jenderal RLPs, 2006.

2. Realisasi Produk Kayu Bulat

Perkembangan realisasi produk kayu bulat dari hutan rakyat tahun 1999/2000 sebanyak 895.371 m³ atau 4,34% dari jumlah realisasi produk kayu bulat pada periode tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2003 produk kayu bulat dari hutan rakyat menurun secara signifikan dan hanya mencapai 59.538 m³ (0,59%) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Produksi Kayu Bulat dari Tahun 1999-2003

No	Asal Kayu	Tahun				
		1999/2000 (M ³ /Cu M)	2000 *) (M ³ / Cu M)	2001 (M ³ / Cu M)	2002 (M ³ / Cu M)	2003 (M ³ / Cu M)
1	RKT Hutan Alam	10.373.932,00	3.450.133,00	1.809.099,00	3.019.839,00	3.652.335,00
2	Perum Perhutani	1.890.900,00	1.511.000,00	1.455.403,00	1.559.026,00	976.806,00
3	Hutan Tanaman	2.974.101,00	5.783.514,00	5.918.766,00	4.933.756,00	4.441.065,00
4	Hutan Rakyat	895.371,00	488.910,00	00	00	59.538,00
5	IPK	7.271.907,00	4.564.591,00	2.323.614,00	182.708,00	956.471,00
	Jumlah	20.619.940,00	13.798.535,00	10.051.479,00	8.136.303,00	10.086.217,00
	Rata-rata	4.123.988,00	2.759.707,00	2.010.295,80	1.627.260,60	201.7243,40

Sumber : ITTO Project (2004).

3. Perkiraan Pasokan Kayu Bulat

Kebutuhan bahan baku kayu untuk industri pada tahun 2004 yaitu sebesar 38,76 juta m³, sedangkan perkiraan pasokan bahan baku kayu untuk industri dari hutan alam hanya sebesar 5,7 juta m³ atau sebesar 13,48%, dan yang berasal dari hutan rakyat sebanyak 10,7 juta m³ atau sebesar 25,30% dari jumlah perkiraan pasokan kayu bulat nasional sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 di bawah.

Pada Tabel 3 di bawah dapat dilihat kebutuhan bahan baku untuk industri perkayuan di Indonesia lebih banyak di pasok dari hutan rakyat, hal tersebut terjadi karena pasokan bahan baku kayu yang berasal dari hutan alam sudah sangat terbatas jumlahnya, ini menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari hutan rakyat mempunyai potensi dan andil yang cukup besar dalam memasok kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Indonesia, oleh karenanya penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat sangat diperlukan khususnya dalam mengatur peredaran kayu rakyat agar kebutuhan bahan baku kayu untuk industri dapat terpenuhi.

Tabel 3. Perkiraan Pasokan Kayu Bulat Tahun 2004

(Dalam Jutaan)

No	Sumber	Jumlah (M ³ /Cu M)	%	No	Produk	Jumlah (M ³ /Cu M)	%
1	Hutan Alam	5,7	13,48	1	Plywood	9,27	23,92
2	Hutan Tanaman	15,6	36,88	2	Sawn Timber	7,24	18,68
3	Hutan Rakyat	10,7	25,30	3	Wood Working	1,75	4,79
4	Kebun	7,5	17,73	4	Pulp	20,39	52,61
5	Perum Perhutani	0,8	1,89				
6	Impor	2,0	4,73				
7	IPK / APL	00	0				
	Jumlah	42,3	100			38,76	100
	Rata-rata	6,04				9,69	

Sumber : Anonim, 2004.

B. Prosedur PUHH di Hutan Rakyat Sebelum Diterbitkannya Permenhut Nomor P.55/2006

Prosedur penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat sebelum diberlakukannya Permenhut P. 55/2006 dapat dilihat dari berbagai aspek terkait, diantaranya pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, legalitas kayu rakyat, penebangan kayu rakyat, pengangkutan kayu rakyat, dan kelembagaan pengurusan kayu rakyat.

1. Pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat

Pemanfaatan hutan rakyat diatur berdasarkan Permenhut Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Pada pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Pada pasal 16 dinyatakan, bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Permenhut No. P.26/2005 pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penatausahaan hasil hutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, yang kemudian beberapa pasal dalam SK tersebut disempurnakan dengan Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2005, dan Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan bahwa dalam upaya untuk mencegah kerusakan hutan negara dan sebagai pengamanan, pengendalian dan keseragaman dalam melaksanakan peredaran kayu rakyat di lintas Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi diharapkan membuat Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di hutan rakyat, yang mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 dan Permenhut No. P.18/Menhut-II/2005, dan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006.

2. Legalitas kayu rakyat

Berdasarkan Permenhut Nomor P.26/2005 pasal 17, ayat (1) yang menyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara.

Untuk lebih mengoptimalkan dalam penatausahaan hasil hutan dalam upaya menjaga Kelestarian Hutan sesuai dengan PP Nomor 6/2007, pejabat yang berwenang dalam menerbitkan bukti kepemilikan kayu rakyat atau SKAU dalam hal ini adalah Kepala Desa atau pejabat yang setara diberikan pelatihan setingkat pejabat penerbit lainnya seperti P2LHP, P2SKSHH, P3HH dan kemudian diberikan sertifikat serta Surat Ijin Penerbitan SKAU, sedangkan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pejabat tersebut dilakukan oleh Dinas Kabupaten / Kota setempat yang membidangi kehutanan.

3. Penebangan kayu rakyat

Pada pasal 35, ayat (1) SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, dinyatakan bahwa Pemilik hutan hak/rakyat termasuk pemilik kebun yang memanfaatkan kayu bulat dari *land clearing* wajib membuat dan melaporkan realisasi penebangan / pemanenan dan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan format blanko LMKB. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.

Sehubungan dengan hasil kayu rakyat atau hasil hutan dari hutan hak yang akan diterbitkan SKSHH nya, maka apabila kita lihat pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2005, pasal 33 ayat (3) huruf (d), yaitu kayu yang akan diterbitkan SKSHH untuk diangkut/dijual ke industri pengolahan kayu wajib dilakukan pengukuran oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan (PHH), dan kemudian dalam huruf (e), dinyatakan bahwa Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Hasil Hutan dengan cap KR (DHH-KR), dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh petugas bersangkutan sebagai dasar penerbitan SKSHH oleh P2SKSHH. DHH-KR dibuat atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penguji Hasil Hutan (PHH), dan harus disahkan oleh petugas Kehutanan yang berkualitas Penguji Hasil Hutan (PHH), dan ini merupakan dasar dalam permohonan penerbitan SKSHH serta sesuai dengan mekanisme penatausahaan hasil hutan yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2005 dan Permenhut Nomor P.18/2005.

4. Pengangkutan kayu rakyat

Berdasarkan ketentuan teknis yang ada, bahwa setiap peredaran hasil hutan kayu rakyat wajib disertai dokumen pengangkutan, dan sesuai dengan pasal 16 ayat (1) SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, yang menyatakan bahwa : Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dari lokasi penebangan / pemanenan di tempat tebangan atau dari TPn yang akan di angkut ke TPk hutan wajib menggunakan Daftar Pengangkutan (DP), yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPHHK atau ILS dengan menggunakan blanko model DK. A. 202. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa DP dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen pengangkutan antara dan bukti keabsahan hasil hutan. Untuk dimasa yang akan datang dalam pengangkutan kayu rakyat akan diberlakukan dokumen angkutan lain selain SKSHH yang di cap KR, yaitu Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai dokumen angkutan kayu rakyat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara, sesuai dengan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006, akan tetapi dalam Permenhut tersebut pada pasal (4), huruf (a), jenis kayu yang akan diangkut masih terbatas pada 3 (tiga) jenis kayu saja, yaitu kayu sengon, kayu karet, dan kayu kelapa, sedangkan untuk jenis kayu lainnya akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan kemudian atas dasar usulan dari masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebaran kayu (pasal (4), huruf (b)).

Sesuai dengan pasal 11, ayat (2) Permenhut Nomor P.51/2006 menyatakan bahwa dengan ditetapkan peraturan ini, maka ketentuan Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku untuk jenis-jenis kayu diluar jenis-jenis kayu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dalam peraturan ini.

5. Kelembagaan Pengurusan Kayu Rakyat

Dalam Permenhut Nomor P.26/2006 pasal (24) ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengembangkan hutan hak melalui pengembangan kelembagaan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha.

Permasalahan yang ada di tingkat petani, adalah : petani menjual pohon/kayu yang dimilikinya kepada para pedagang perantara atau tengkulak sebelum masak tebang karena terdesak keperluan uang/dana untuk biaya nikah anak, sekolah, berobat dan lain sebagainya. Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan memutus rantai tata niaga seperti tersebut di atas. Disamping itu dapat dilakukan juga dengan membentuk suatu wadah kelembagaan di tingkat petani seperti Koperasi Pemilik Hutan Rakyat (KPHR) yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu penyediaan dana untuk petani pada saat petani tersebut membutuhkannya sehingga petani tersebut tidak menjual kayunya dengan harga yang rendah. Selain itu keberadaan KPHR diharapkan dapat membuat harga kayu rakyat stabil, persediaan kayu rakyat terjamin dan terjadinya negosiasi dengan dengan pihak luar (pemohon kayu) seperti IPKH, IPK, ILS dan lain sebagainya mengenai harga kayu rakyat.

C. Substansi Perubahan dan Dampak Permenhut Nomor P.55/2006 Terhadap Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat

1. Substansi Perubahan dalam Permenhut Nomor P.55/2006

Ketika PUHH masih berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, pasal-pasal yang mengatur mengenai PUHH dari hutan rakyat masih ada dan berjalan dengan baik, akan tetapi dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, pasal yang mengatur mengenai penatausahaan dari hutan rakyat hanya 1 (satu), yaitu pasal 60 ayat (5) mengenai penggunaan SKSKB yang di Cap KR sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di luar jenis kayu yang telah ditetapkan dalam Permenhut Nomor P.51/2006. Oleh karenanya dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, secara umum PUHH yang berasal dari hutan rakyat tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya atau dengan perkataan lain tidak jelas payung hukumnya sebagaimana yang terlihat pada Pasal 61 Permenhut Nomor P.55/2006. Sebelum diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, penatausahaan hasil hutan di hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 serta Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2005, adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penatausahaan hasil hutan tersebut berjalan cukup baik walaupun untuk selanjutnya SK Menhut Nomor 126/2003 maupun Permenhut Nomor P.18/2005 masih harus disempurnakan lagi sejalan dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional di negara ini.

2. Dampak Pelaksanaan Permenhut Nomor P.55/2006 Terhadap Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat

Dari uraian tentang prosedur PUHH di hutan rakyat dapat dilihat bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, Permenhut Nomor P.18/2005, Permenhut Nomor P.26/2006, dan Permenhut Nomor P.51/2006 mempunyai peran yang cukup besar sebagai dasar acuan dalam pelaksanaannya. Namun perubahan dasar acuan PUHH dari SK Menhut Nomor 126/2003 dan Permenhut Nomor P.18/2005 menjadi Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang PUHH di hutan negara yang berdampak besar pada pelaksanaan PUHH di kawasan hutan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 61 huruf (a, b, dan c) dari Permenhut Nomor P.55/2006 yang menyatakan bahwa SK Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 Jo No. 334/Kpts-II/2003; No. 279/Menhut-II/2004 dan

Permenhut No P.18/Menhut-II/2005 tentang penatausahaan hasil hutan dan SK Menhut No. 127/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya adalah PUHH di hutan rakyat tidak mempunyai payung/dasar hukum untuk pelaksanaan PUHH-nya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di lapangan karena hingga saat ini permasalahan PUHH yang ada saja belum dapat diselesaikan seperti contohnya dalam pengangkutan kayu, dokumen angkutan kayu sering dipermasalahkan oleh institusi diluar Departemen Kehutanan padahal secara prosedur penatausahaan hasil hutan (perijinan, legalitas kayu dan lain sebagainya) telah dilaksanakan atau ditempuh dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi upaya penyelesaian masalah tersebut tidak akan berjalan karena terganjal oleh tidak adanya payung/dasar hukum untuk melaksanakan PUHH tersebut.

Dari hasil kajian terhadap isi Permenhut Nomor P.55/2006 menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenhut tersebut tidak efektif apabila dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dengan berbagai alasan. *Alasan pertama*, pada kalimat mukadimah yang menyatakan “Memutuskan dan Menetapkan Permenhut Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara” dan juga tercantum pada Ketentuan Umum (Pasal 1) Permenhut Nomor P.55/2006 memperjelas bahwa permenhut tersebut lebih dominan mengatur PUHH yang berasal dari kawasan hutan negara daripada di kawasan hutan rakyat. *Alasan kedua*, Permenhut Nomor P.55/2006 memiliki klausul (Pasal 60 Ayat 5) yang berkaitan dengan dokumen angkutan kayu rakyat seperti yang telah diuraikan di atas, akan tetapi isi pasal tersebut tidak jelas dan tuntas karena hanya menerangkan dokumen angkutan kayu bulat saja, sedangkan dokumen angkutan untuk kayu lanjutan (kayu olahan) tidak diterangkan. *Alasan ketiga*, Permenhut Nomor P.55/2006 malah membuat kekosongan hukum dalam pelaksanaan PUHH di kawasan hutan rakyat sehingga menjadi penghambat kelancaran peredaran kayu rakyat di lapangan. Dengan perkataan lain, Permenhut ini tidak menggunakan prinsip “menyelesaikan masalah tanpa masalah” tetapi lebih kepada prinsip “memperumit masalah dengan masalah masalah baru”.

Kejelasan hukum atau payung hukum dalam PUHH di hutan rakyat sangat diperlukan, karena pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan, masih saja berkutat dan berwacana dalam mengambil langkah penyelesaian berbagai masalah di bidang kehutanan sehingga permasalahan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

D. Penyempurnaan Permenhut No. P. 55/2006

Hasil analisis dari pasal-pasal dalam Permenhut Nomor P.55/2006 menunjukkan bahwa pelaksanaan permenhut tersebut tidak efektif apabila dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, karena isi permenhut tersebut jelas lebih dominan mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa Permenhut tersebut sebenarnya telah direvisi dalam waktu 2 (dua) bulan pelaksanaanya melalui Permenhut Nomor P.63/2006 tentang perubahan Permenhut Nomor P.55/2006 tentang PUHH yang berasal dari hutan negara. Revisi yang singkat (2 bulan) mengindikasikan bahwa Permenhut Nomor P.55/2006 terlalu prematur dibuat dan tanpa terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik di daerah-daerah sebagai pelaksana dari aturan tersebut.

Dalam melakukan revisi Permenhut Nomor P. 55/2006 ada 4 (empat) hal penting yang perlu diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangannya, diantaranya: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii)

pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH hutan rakyat kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

1. Sistem Penatausahaan Hasi Hutan di Hutan Rakyat

Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (UU No. 41/1999) atau hutan yang tumbuh pada tanah yang bukan kawasan hutan dan status kepemilikannya jelas. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat oleh pemilik hak/rakyat apabila dilakukan secara baik dan benar serta memperhatikan keadaan lingkungan bukan merupakan suatu ancaman terhadap ekosistem atau kelestarian alam, maka seyogyanya pemerintah tidak mempersulit dalam setiap pengurusan administrasi atau pengurusan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat. Jika memungkinkan pemerintah harus membantu agar perkembangan pembangunan hutan rakyat makin cepat sebagaimana diamanatkan pasal 103 PP Nomor 6 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha. Dengan demikian pemerintah berkewajiban memberikan insentif kepada pemilik lahan yang digunakan untuk hutan paling tidak senilai dengan kredit karbon dari program *Clean Development Mechanism (CDM)* yang diakibatkan pembangunan hutan itu setiap tahun. Disamping mempermudah proses administrasi pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat, pemerintah juga memberikan pengarahan secara teknis atau memberikan penyuluhan agar lahan hak/milik yang tidak produktif dapat ditanami pepohonan.

Pasal 15, ayat (2), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/2005 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak/rakyat yang berfungsi produksi dapat berupa :

- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu ;
- b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan

Kemudian, pada pasal 16 dinyatakan bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar acuan penatausahaan hasil hutan adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, akan tetapi dalam SK Menteri Kehutanan tersebut pasal-pasal mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum secara rinci mengatur mengenai prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dipandang perlu untuk dibuatkan suatu acuan atau petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk tersebut dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penertiban pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain merupakan dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksana di lapangan dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan rakyat.

2. Permasalahan Umum Dalam Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat

Secara umum permasalahan permasalahan yang ada dalam penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat telah diidentifikasi oleh Syahadat dan Sianturi (2006) sebagai berikut :

- a) Harga kayu di tingkat petani rendah, karena biasanya petani menjual kayu tersebut ke pedagang pengumpul (tengkulak) atas dasar kebutuhan dana yang mendesak meskipun umur pohon tersebut belum masak tebang (daur butuh).

- b) Adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat rencana penebangan (ijin tebang), seperti harus melampiri peta areal hutan hak/rakyat yang harus diketahui oleh Camat setempat, melampirkan laporan potensi tegakan dan lain sebagainya, sehingga dalam pengurusannya terkesan rumit.
- c) Permasalahan yang timbul dalam penatausahaan hasil hutan di era otonomi daerah yaitu kebijakan penatausahaan hasil hutan tersebut tidak memiliki petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaannya antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi dapat berbeda.
- d) Daerah tujuan kayu tidak memperoleh bagian insentif hasil hutan dari kayu yang diproduksi di daerah lain (asal kayu), sehingga daerah tujuan kayu tidak mempunyai dana koordinasi, yang mana dana koordinasi tersebut diperlukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kayu rakyat yang ilegal (*illegal logging*)
- e) Dalam pengangkutan kayu rakyat penggunaan SKSHH yang di cap KR sebagai dokumen pengangkutan kayu rakyat untuk beberapa jenis kayu di luar jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan SKAU sebagai dokumen pengangkutan resmi sesuai dengan Permenhut Nomor 51/2006 masih memberatkan para petani.
- f) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas kehutanan terhadap peredaran kayu rakyat ketika kayu yang berasal dari satu daerah sampai di tempat tujuan kayu, atau ketika kayu dari luar daerah masuk ke daerah tujuan kayu di Kabupaten/Kota.

3. Pemisahan Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat

Untuk lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatan kayu rakyat oleh masyarakat dan untuk mempermudah dalam pemberian ijin pemanfaatan hutan rakyat, maka dalam pemanfaatan kayu rakyat dari hutan rakyat dikelompokkan ke dalam dua (2) katagori (Syahadat E, 2006), yaitu :

- a. Pemanfaatan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu sendiri atau digunakan sendiri.
- b. Pemanfaatan kayu rakyat untuk dikomersilkan atau diperjual belikan.

Untuk katagori kelompok pertama (a), yaitu kayu rakyat untuk keperluan sendiri, maka dalam pengurusan ijinnya cukup melaporkan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat. Akan tetapi untuk memastikan bahwa kayu tersebut memang milik rakyat, dan penggunaannya benar-benar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka dari pihak aparat baik aparat desa maupun dinas kehutanan Kabupaten/Kota melalui KCDK atau UPTD harus mengadakan pengecekan ke lapangan. Apabila kayu rakyat tersebut akan dimanfaatkan untuk tujuan komersil atau diperjual belikan (katagori b), maka dalam pemanfaatan kayu rakyat tersebut perlu diatur lebih lanjut oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi masalah Kehutanan, seperti dalam pembuatan Surat Ijin Penebangan (SIP), dokumen angkutan, dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (Kepala Desa, Camat, KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat). Pemilik hutan rakyat tidak dibebani macam-macam surat yang harus diurus apalagi dengan macam-macam biaya, akan tetapi setiap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat (penebangan pohon) harus mempunyai Surat Ijin Penebangan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, melalui KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat, adapun dasar pertimbangan permohonan SIP harus melalui KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa KCDK atau UPTD tersebut merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

yang berada di tingkat Kecamatan yang mengetahui tegakan kayu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, selain daripada itu di dalam upaya untuk menjaga dan atau memastikan bahwa kayu rakyat yang akan dimanfaatkan tersebut bukan berasal dari kawasan hutan milik negara.

4. Pendelegasian Pengurusan Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat

Dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat, Permenhut tersebut hanya merupakan salah satu kegiatan atau bagian dalam pelaksanaan PUHH yang berupa tatacara atau mekanisme pengurusan dokumen pengangkutan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat dan bukan merupakan pelaksanaan PUHH secara keseluruhan (ijin pemanfaatan, legalitas kayu, laporan hasil penebangan dan lain sebagainya). Permenhut tersebut masih membatasi mengenai jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan SKAU, yaitu baru tiga jenis kayu, yaitu kayu Sengon, kayu Karet dan kayu Kelapa. Sedangkan dokumen angkutan untuk jenis kayu rakyat di luar dari ketiga jenis kayu tersebut menggunakan SKSKB yang di Cap KR sebagaimana isi Permenhut Nomor P.55/2006 Pasal 60 Ayat 5. Namun permasalahan yang muncul adalah dokumen angkutan apa yang dipakai untuk produk kayu lanjutan (kayu olahan) yang berasal dari hutan rakyat karena bila menggunakan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang di cap KR kelihatannya agak janggal dan tidak rasional.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan penatausahaan hasil hutan khususnya yang berasal dari hutan rakyat dapat dilakukan dengan memberikan pendelegasian kewenangan dalam mengatur penatausahaannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

Di dalam membangun hutan rakyat dan keberhasilan pelaksanaan PUHH di hutan rakyat, Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai andil, peran serta, dan tanggung jawab moril dan materil yang cukup besar sehingga pendelegasian kewenangan dalam pengaturan pelaksanaan PUHH di kawasan hutan rakyat merupakan salah satu upaya yang patut di tempuh oleh pemerintah pusat maupun provinsi dalam menyelesaikan kekosongan hukum. Hal ini sejalan dengan Permenhut Nomor P.51/2006 Pasal 9 (Pembinaan dan Pengendalian) Ayat 3 yang menyatakan “ Dalam rangka ketertiban pelaksanaan PUHH kayu yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredarannya”.

Pendelegasian wewenang pengurusan PUHH kepada Provinsi sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah sehingga adanya pengakuan hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendelegasian kewenangan dalam mengatur pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat dapat dilaksanakan, misalnya: pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan mengeluarkan pedoman umum, Dinas Kehutanan Provinsi membuat petunjuk pelaksanaan (juklak), dan Dinas Kehutanan Kabupaten membuat petunjuk teknis (Juknis) untuk pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Dengan dilaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut diharapkan semua permasalahan dalam pelaksanaan PUHH di kawasan hutan rakyat dapat di antisipasi dan berjalan dengan baik dan lancar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Hasil hutan rakyat mempunyai potensi dan kontribusi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu di Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian yang layak oleh para pihak yang terlibat dalam pengembangan hutan rakyat.
- 2 Hutan rakyat mempunyai fungsi yang penting bagi pembangunan nasional akan tetapi belum tertata dengan baik dan menjadi prioritas kebijakan di tingkat pusat.
- 3 Prosedur / tata cara pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat belum jelas pasca keluarnya Permenhut Nomor P.55/2006.
- 4 Penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat belum secara rinci diatur dalam perundang-undangan, prosedur / tata cara pemanfaatan hasil hutan di hutan hak/rakyat belum jelas.
- 5 Penggunaan SKSHH sebagai dokumen pengangkutan kayu rakyat masih diberlakukan untuk jenis kayu diluar jenis kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, akan tetapi dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006 istilah SKSHH yang di cap KR diganti menjadi SKSKB yang di cap KR (sesuai dengan pasal 60 Permenhut Nomor P.55/2006).

B. Saran

- 1 Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat masih perlu untuk disempurnakan, dalam rangka perbaikan pelayanan publik terhadap pengolahan hutan agar pengolahan hutan dapat lebih efisien, efektif, dan lestari.
- 2 Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara perlu dikaji ulang karena Permenhut tersebut lebih dominan mengatur dan menetapkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara dan berdampak negatif terhadap pelaksanaan PUHH di kawasan hutan rakyat dengan membuat tidak jelas dasar/payung hukumnya sebagai dasar pelaksanaannya.
- 3 Untuk jenis lainnya diluar ketiga jenis kayu seperti yang sudah ditentukan dalam Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 agar ditetapkan oleh Menteri Kehutanan secepatnya untuk menghindari penyalah-artian dan wewenang yang terkait dengan INPRES No. 4/2004 tentang pemberantasan *illegal logging* yang dilakukan oleh instansi diluar Departemen Kehutanan yang berakibat pada pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat selalu dianggap bermasalah dan seringkali ditangkap.
- 4 Pendelegasian wewenang oleh Departemen Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat sudah dapat dijalankan karena telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Permenhut No. P.51/2006 sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 yang berdampak kepada ketidak jelasan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat.
- 5 Perlu dibuatkan aturan atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) dari sistim penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat agar tercipta penyelenggaraan hasil hutan rakyat, tertib lancar, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts-II/2003, tanggal 4 April 2003. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2005, tanggal 13 Juli 2005. Tentang Perubahan Ketiga SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.26/Menhut-II/2005, tanggal 6 Agustus 2005. Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2002, tanggal 8 Juni 2002. Tentang Dana Reboisasi. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Syahadat, E, Sianturi, A. 2006 Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat (Kasus di Provinsi Jawa Barat). Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F), Bandung.
- Syahadat, E. 2006. Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 3 No 1, Bogor.
- Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.